BAB II SEJARAH KONFLIK ROHINGYA

Pada bab ini penulis akan membahas sejarah singkat dari Negara Myanmar yang merupakan Negara dimana konflik Rohingya ini berasal. Setelahnya, penulis akan menjelaskan juga sejarah etnis Rohingya yang berada di wilayah Arakan sebelum berganti nama menjadi Rakhine. Selanjutnya, bagian dua dari skripsi ini juga akan membahas bagaimana respon dari pemerintah setempat terhadap kasus yang sedang berlangsung di negaranya tersebut.

1. SEJARAH SINGKAT MYANMAR

Myanmar merupakan salah satu Negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara bersama Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Filipina serta Timor Leste. Sebelum memperoleh kemerdekaannya, Negara ini terlebih dulu mengalami masa penjajahan yang cukup panjang. Negara ini sempat dijajah oleh Inggris, Negara ratu Elizabeth itu mulai melakukan penjajahan kepada Myanmar pada tahun 1885. Tidak hanya Inggris, namun Jepang ternyata juga pernah melakukan penjajahan atas Myanmar. Awal invasi Jepang atas Negara ini terjadi pada tahun 1941 tepatnya pada bulan Desember yang dibantu oleh *Myanmar Independence Army* yang dipimpin Aung San.

Kedatangan Jepang ini bertujuan untuk mencari dukungan atas negaranya dalam perang dunia, dimana Jepang dan Inggris merupakan kedua pihak yang berbeda kubu. Atas invasi yang dilakukan Jepang serta keberadaan Inggris di Myanmar menyebabkan Negara tersebut terbagi atas dua kubu, pihak yang memihak ke Inggris serta pihak yang memihak ke Jepang. Hal ini berakhir setelah Jepang berhasil merebut hati masyarakat Myanmar dengan memberikan sebuah 'Kemerdekaan' kepada Myanmar. Namun, atmosfer

seperti ini tidak berlangsung lama, pada tahun 1945 masyarakat Myanmar memulai gerakan untuk mendapatkan kemerdekaan dan usaha untuk melepaskan diri dari Jepang.

Setelah mengalami perjuangan demi mendapatkan kemerdekaan yang dimulai dari tahun 1945, negara ini akhirnya berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 4 januari 1948 dari penjajahan Jepang setelah mengalami masa penjajahan yang panjang. Bentuk awal Negara ini ketika berhasil mendapatkan kemerdekaannya ialah Republik Independent yang dipimpin oleh Sao Shwe Thaik sebagai Presiden pertama Myanmar saat itu serta U Nu yang juga mendapatkan posisi sebagai Perdana Menteri Myanmar.



Gambar 2.1-1 Peta Asia Tenggara

Source: nusantaranews.co

Sejak tahun 1962 sistem pemerintahan di Myanmar kala itu dikuasai oleh Militer, yang mana dalam hal ini militer Myanmar berhasil mendominasi dalam segala sisi pada system pemerintahan kala itu. Setelah mengambil alih kekuasaan atas Myanmar, pihak militer membuat beberapa peraturan atau format unik terhadap sosialisme di Myanmar. Pihak militer menarik Myanmar dari dunia internasional, pada masa ini Myanmar mengisolasi serta menarik dirinya dari jangkauan pihak manapun, hal tersebut diyakini akan membuahkan dampak positif dalam segi kehidupan sosial, politik serta ekonomi Negara tersebut.

Pada awalnya Negara ini memakai nama Burma sebagai nama negaranya saat memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948. Nama 'Myanmar' ini diambil dari kata 'Mranma' yang mana merupakan nama nasional yang digunakan oleh masyarakat Myanmar. Nama tersebut resmi digunakan masyakarat setempat sejak hari kemerdekaan Negara tersebut. Akan tetapi, pada tahun 1988, atau sejak Junta Militer mengambil alih kekuasaan Myanmar, rezim tersebut menganti nama Negara tersebut menjadi Myanmar.

Alasan dari pihak Junta Militer untuk mengganti nama Myanmar menjadi Myanmar ini dikarenakan agar etnis non-Myanmar yang bermukim di Negara tersebut dapat merasakan menjadi bagian dari Negara tersebut serta tidak diskriminasi di dalamnya dan juga ingin melepaskan diri dari bayang-bayang masa penjajahan Inggris. Namun, hal ini menimbulkan berbagai pro dan kontra bagi sebagian masyarakat Internasional, sebagian dari mereka sepakat menggunakan Myanmar sebagai nama Negara tersebut, akan tetapi sebagian lagi enggan menggunakan nama Myanmar melainkan tetap menggunakan Myanmar sebagai nama resmi Negara tersebut. Beberapa pihak yang menggunakan nama Myanmar ini adalah United Nations sebagai lembaga yang menaungi berbagai Negara di seluruh dunia.

UN sepakat akan menggunakan nama Myanmar sebagai nama resmi salah satu Negara yang terletak di Asia Tenggara tersebut. Setali tiga uang dengan keputusan yang diambil oleh UN, ASEAN selaku asosiasi atau lembaga yang menaungi Negara-negara yang terletak di Asia Tengga pun juga menyepakati untuk menggunakan nama Myanmar sebagai nama resmi Negara tersebut. Namun, hal berbeda justru dikemukakan oleh Inggris, Negara tersebut menolak menggunakan Myanmar sebagai nama resmi Negara ini melainkan tetap mendukung Myanmar sebagai nama resmi dari Negara tersebut diikuti oleh beberapa Negara persemakmuran Inggris (Commonwealth) serta Kanada dan berbagai negara yang tergabung dalam European Union (EU).

Alasan dari pihak Junta Militer terhadap pergantian nama Negara tersebut pun dapat dimaklumi karena Myanmar atau Myanmar juga dikenal sebagai Negara yang memiliki banyak etnis di dalamnya. Hal ini juga bermaksud untuk menghargai perasaan etnis lain yang bermukim di Myanmar, agar mereka merasa tetap dianggap sebagai bagian dari Negara tersebut. Berbicara mengenai etnis, di Negara ini terdapat lebih dari 100 etnis atau lebih tepatnya 135 etnis yang tersebar diseluruh wilayah Myanmar.

Myanmar: Major ethnic groups Myanmar officially recognises 135 ethnic groups but Rohingy Muslims have been rendered stateless and stripped of their citizenship, ETHNIC GROUPS Bamar INDIA CHINA Shan Karen Rakhine* MYANMAF BANGLADESH Rohingya Kachin Chin Karenni ROHINGYA Mon Wa Kokang Chinese Ethnic minority states Rakhine-Rohingya inter-ethnic conflict Conflict area Capital

Gambar 2.1-2 Peta Persebaran Etnis di Myanmar

Source: Aljazeera.com

Pada gambar peta diatas menunjukkan persebaran etnis di Myanmar, dimana beberapa etnis yang ditampilkan di dalam gambar tersebut merupakan etnis mayoritas yang mendiami wilayah Myanmar ratusan tahun lamanya. Sedangkan etnis lainnya yang tidak tercantum dalam peta tersebut sudah dipastikan termasuk kedalam golongan etnis minoritas. Dari sekian banyak etnis mayoritas yang hidup di Negara tersebut, etnis-etnis mayoritas tadi pun mempunyai

pembagian persentase agar dapat dilihat kelompok mana yang memiliki jumlah yang paling banyak dan paling mendominasi di Myanmar.

Grafik 2. 1 Persentase etnis mayoritas di Myanmar



source: Warzone Initiative: Rohingya Briefing Report 2015 .pdf

Dari grafik di atas terlihat apabila etnis Myanmar keberadaannya mendominasi berbagai etnis lainnya, dimana etnis ini menempati posisi pertama dengan jumlah persentasi 68% dari total keseluruhan jumlah penduduk yang bermukim di Myanmar. Posisi selanjutnya adalah etnis Shan yang memperoleh 9% dari jumlah keseluruhan penduduk serta posisi terakhir ditempati oleh etnis Indian dan Mon yang masing-masing memperoleh 2% dari seluruh jumlah penduduk Myanmar. Etnis Myanmar sebagai etnis mayoritas di Negara ini juga membuktikan dominasinya dalam kancah perpolitikan serta pemerintahan di Myanmar. Tujuh etnis yang terdapat pada grafik di atas merupakan beberapa etnis mayoritas yang tersebar diseluruh kawasan di Negara Myanmar (Warzone Initiatives, 2015).

Selain ketujuh etnis di atas terdapat ratusan etnis lainnya baik yang diakui secara resmi oleh pemerintah Myanmar ataupun yang belum diakui secara resmi. Gabungan dari berbagai etnis tersebut memperoleh poin 5% sesuai dengan grafik di atas. Hal tersebut menunjukan bahwa ratusan etnis lainnya apabila digabungkan hanya memperoleh poin sebesar 5% saja dari total seluruh masyarakat yang bermukim di Myanmar. Jika dilihat dari persentase diatas, artinya dengan persentase yang hanya berjumlah sebanyak 5% dari total

keseluruhan penduduk Myanmar serta masih harus dibagi lagi dengan etnis lainnya maka berbagai etnis tersebut dikatakan sebagai etnis minoritas. Berbicara mengenai etnis minoritas khususnya yang berada dalam Negara Myanmar memang merupakan salah satu hal yang menarik perhatian banyak kalangan, terlebih lagi mengingat Negara ini merupakan salah satu Negara yang kaya akan keberagaman etnisnya. Salah satu etnis yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah etnis Rohingya.

2. Sejarah Etnis Rohingya di Arakan

Konflik dan etnis Rohingya seperti tidak terpisahkan dalam sejarahnya. Hal ini dikarenakan etnis Rohingya ini telah berada di dalam situasi konflik bahkan sejak Myanmar atau yang lebih dikenal saat ini sebagai Myanmar memperoleh kemerdekaannya. Konflik Rohingya ini tepatnya telah berlangsung sejak masa penjajahan Myanmar yang dilakukan oleh Inggris. Penyebab dari pecahnya konflik yang melibatkan etnis ini adalah karena terjadinya gesekan dengan etnis lainnya yang bermukim di wilayah yang sama serta adanya tindak diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Untuk itu, sebelum membahas serta mengupas lebih dalam permasalahan yang terjadi di Rohingya ini akan lebih baik jika kita mengetahui asal usul etnis tersebut serta awal mula konflik Rohingya itu tercipta. Hal tersebut telah dibagi atas beberapa bagian seperti berikut:

a. Awal Mula Islam dan Etnis Rohingya Di Arakan

Sebelum berganti nama menjadi Arakan dan pada akhirnya berganti lagi menjadi Rakhine, Negara bagian yang terletak dibagian selatan Myanmar ini sempat memiliki banyak sekali istilah atas wilayahnya. Istilah-istilah yang sempat digunakan oleh Arakan adalah Roang/Rohang/Roshang yang merupakan beberapa kata atau istilah yang berasal dari Arab yang berarti berkah/rahmat. Nama atau istilah tersebut sering sekali dikait-kaitkan oleh pedagang yang berasal dari Arab dan Persia dengan Kerajaan lama Vesali yang telah ada satu abad

lamanya sebelum daerah Chandra yang sering mereka datangi. Berbeda dengan istilah diatas, kelompok Myanmar memiliki istilah atau nama lain untuk wilayah ini yaitu Rambree yang kemudian diubah sedikit sehingga lahirlah kata Ramrhee sebagaimana nama yang diberikan pihak Inggris atas wilayah ini.

Di Negara bagian ini terdapat dua kelompok masyarakat yang bermukim, yaitu kelompok Rohingya dan Kelompok Maghs. Perbedaan signifikan kedua kelompok ini adalah dari segi agama. Kelompok Maghs merupakan suatu etnis atau kelompok yang mana orang-orang di dalamnya memeluk agama Buddha atau seorang yang mengakui kultus Buddhisme. Berbeda dengan Maghs, kelompok atau etnis Rohingya ini merupakan etnis atau kelompok yang mana orang-orang di dalamnya memeluk agama Islam. Adapun perbedaan lain dari kedua kelompok ini adalah dari segi jumlahnya.

Etnis atau kelompok Maghs termasuk ke dalam kelompok mayoritas di Myanmar, karena memeluk agama Buddha yang merupakan agama mayoritas di Negara ini. Hal yang bertolak belakang terjadi dengan kelompok Rohingya. Kelompok ini masuk kedalam grup minoritas, karena masyarakat atau orang-orang yang tergolong dalam kelompok Rohingya ini memeluk agama Islam yang merupakan salah satu agama minoritas di Myanmar. selain kedua kelompok tadi, masih banyak kelompok yang mendiami wilayah Arakah yaitu Kamis, Mros, Chaungthas, Saaks, Chins, Khaungtsos, Chaws, Kons dan Ahnus yang rata-rata berada di kawasan perbukitan dan ras utama dari kelompok tersebut adalah Mros, Kamis, Chaungthas dan Chins serta sebagian besar dari kelompok ini menganut paham animisme.

Gambar 2 2-1 Peta Negara bagian Rakhine tempat dimana etnis Rohingya berada



Source: www.newdelhitimes.com

Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis yang mendiami Negara bagian Myanmar di sebelah selatan yaitu Arakan atau yang sekarang dikenal sebagai Rakhine. Istilah Rohingya berasal dari kata Rohai atau Roshangee yang merupakan terminologi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk kata Rohingya. Kata Rohai Roshangee ini merupakan kata atau istilah untuk menunjukan bahwa mereka orang-orang muslim yang bermukim di wilayah Lama biasa disebut Arakan atau vang sebagai Rohang/Roshang/Ronga (Yunus, 1994).

Seorang sejarawan asal Inggris yang bernama Francis Buchanan-Hamilton adalah orang pertama memperkenalkan sebutan Rohingya kepada masyarakat Internasional. Buchanan-Hamilton dalam laporannya yang diterbitkan pada tahun 1799 dengan judul A Comparative Vocabulary of Some of the Language Spoken in the Burma Empire mengungkapkan bahwa ia menambahkan tiga bahasa lagi yang digunakan pada imperium Burma yang menurutnya berasal dari bahasa etnis Hindu (SOAS Bulletin of Burma Research, 2003). Ia menambahkan bahwasanya bahasa pertama yang digunakan oleh umat Islam yang memang telah lama tinggal dan menetap di wilayah Arakan. Para umat Islam yang mendiami wilayah Arakan ini memanggil diri mereka dengan sebutan Rooinga atau suku asli dari Arakan. Namun seiring berjalannya waktu, istilah yang awalnya merupakan "Rooinga" berubah menjadi Rohingya.

Tidak sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Buchanan-Hamilton diatas, seorang sejarawan dari Universitas Kanada yang bernama Aye Chan yang notabene merupakan seorang yang termasuk ke dalam etnis Burma membantah pendapat tersebut. Menurutnya, menyebut atau mengkategorikan kelompok Rohingya sebagai kelompok atau etnis yang berasal dari Myanmar adalah suatu kesalahan besar. Istilah Rohingya ini mulai digunakan oleh masyarakat Myanmar pada tahun 1950-an atau lebihh tepatnya era pasca kemerdekaan. Sebutan ini biasanya digunakan oleh kaumkaum tedidik Benggali yang bermukim di wilayah perbatasan Mayu serta tidak diketahui sumber sejarah dari manapun sebelumnya. Pernyataan yang berasal dari Aye Chan ini terdapat pada sebuah bulletin yang telah diterbitkan pada tahun 2005.

Negara bagian Arakan memang berbeda dengan wilayah atau Negara bagian lain yang terdapat di Myanmar. Arakan merupakan wilayah yang didiami oleh mayoritas masyarakat yang memeluk agama Islam. Meskipun memeluk agama yang sama yakni Islam, terdapat kelompok muslim

lainnya yakni kelompok Chatganiya dan Rohai. Para Rohais Chittagong mengklaim bahwa nenek moyang mereka berasal dari Arakan sedangkan kelompok lainnya yaitu, Rohingya berusaha untuk melacak asal dari leluhur mereka ke Arab, Moor, Turki, Persia, Moghul, Patthan dan Bangalees. Oleh karena asal usul dari leluhurnya tersebut etnis ini memiliki ciri fisik yang berbeda dengan masyarakat Myanmar pada umumnya. Etnis ini tergolong dalam etnis Indo-Arya dimana dalam bahasa serta ciri fisik lebih satu tipe dengan bangsa Indo-Arya lainnya seperti India dan Bangladesh (Republika, 2015).

Kelompok Rohingya ini juga kerap kali disebut sebagai "orang Roma Asia" atau "orang Palestina di Asia Tenggara" karena sejarah serta berbagai pengalaman yang telah mereka alami sebagai salah satu etnis minoritas yang paling mendapatkan diskriminasi di dunia Internasional. Berdasarkan ciri fisiknya, masyarakat Rohingya ini mengarah pada ciri fisik keturunan non-Tibet-Myanmar yang sangat berhubungan dengan kaum Bengali. Dalam segi bahasa, masyarakat Rohingya di dalam kehidupannya sehari-hari menggunakan bahasa Rohingya atau yang disebut sebagai Rohingyalish yang mana juga berhubungan erat dengan dialek dari wilayah Chittagong Bengali, yang juga memiliki kemiripan dengan dialek Teknaf, Ukhia dan wilayah Bazar Cox yang juga terdapat di Chittagong (Singh, 2018).

Keberadaan etnis Rohingya khususnya di Negara bagian Arakan ini mengalami sempat mengalami beberapa era dalam perkembangannya. Pada masa awal kedatangan kelompok ini ke wilayah Rakhine semua berjalan lancar dan baik-baik saja. Bahkan agama Islam yang notabene merupakan agama mayoritas dari kelompok ini memegang peranan penting khususnya dalam hal kemajuan peradaban di wilayah Rakhine pada waktu itu. Semua agama yang dianut oleh penduduk yang bermukim di wilayah Rakhine ini hidup dengan toleransi serta kerukunan umat beragama yang cukup baik pada saat itu. Hal ini terbukti ketika pemerintah Arakan

(sebelum berganti nama menjadi Rakhine) pada saat itu mengeluarkan koin serta medali yang didalamnya terdapat kalimat syahadat yang merupakan ciri khas dari agama Islam dan aksara Persia.

Sejarah etnis Rohingya dimulai ketika nenek moyang mereka yang merupakan keturunan Indo-Arya ini datang lalu menetap di daerah Arakan (Yang sekarang telah berganti nama menjadi Rakhine). Tidak hanya menetap, masyarakat kuno etnis Rohingya inipun juga telah memutuskan untuk memeluk agama Islam yaitu pada abad ke-8. Seiring dengan berjalannya waktu, etnis Rohingya ini tidak hanya berasal dari keturunan Indo-Arya saja namun lahir generasi-generasi baru yang tentunya membawa darah campuran bangsa lain seperti bangsa Arab, Persia, Bengali bahkan Mughal di abad ke 16.

Sebelum masuknya agama Islam, wilayah Arakan ini merupakan wilayah yang mana kebanyakan masyarakatnya menganut agama Buddha. Seperti kebanyakan wilayah atau Negara bagian lain yang terdapat di Myanmar, agama Buddha merupakan agama mayoritas setiap etnis atau kelompok bahkan Negara tersebut. Selain itu, wilayah ini juga dikenal sebagai salah satu Negara bagian di Myanmar yang merupakan satu kerajaan Buddhis yang merdeka. Pada tahun 900-an, daerah Arakan ini menjadi daerah yang ditempati oleh bangsa yang memiliki ras Dravida yang berasal dari Dinasti Hindu dan Buddha di India. Pada periode inilah disebut bahwa era Mrauk U dimulai.

Min Saw Mun mendirikan kerajaan Arakan yang merupakan kerajaan terakhir yang didirikan pada tahun 1430 di wilayah Mrauk U. Min Saw Mun yang merupakan pendiri dari kerajaan tersebut dan juga sebagai orang yang memerintah di Arakan ini memutuskan untuk melakukan pelarian ke wilayah Bengali (atau yang sekarang dikenal sebagai Bangladesh) setelah pihak Myanmar melakukan invasi atas dirinya. Dengan bantuan pihak muslim di Bengali, ia berhasil untuk lari dari pihak Myanmar tersebut dan

mendirikan sebuah kerajaan kembali. Oleh karena bantuan serta dukungan yang diberikan pihak Muslim terhadapnya, Min Saw Mun berhasil mendirikan sebuah kerajaan kembali.

Tidak hanya mendirikan kerajaan kembali, Min Saw Mun beserta raja-raja Arakan lainnya mengambil langkah penting yaitu memutuskan untuk mengubah agama mereka menjadi Islam. pada tahun antara 1430an sampai 1622, dengan mengucapkan kedua kalimat syahadat, raja-raja Arakan ini pun resmi menganut agama Islam dan menjadi seorang muslim. Kekuatan agama Islam di wilayah Rakhine ini semakin hari semakin dirasakan oleh berbagai kalangan. Hal ini dibuktikan dengan komunitas muslim yang telah mendiami Negara bagian tersebut sejak abad ke 14, dimulai dari ketika Narameikhla atau Min Saw Mun mengucapkan dua kalimat syahadat yang menjadi salah satu jalan baginya untuk menjadi seorang muslim dan mengganti namanya menjadi Suleiman Shah, hal tersebut merupakan awal mula dari terbentuknya komunitas muslim di Arakan.

Jalan Raja Sulaeman Shah atau Narameikhla untuk menjadi seorang Muslim ini tidaklah mudah, sebelum memeluk agama Islam beliau merupakan seorang yang menganut agama Buddha serta berasal dari kerajaan Mrauk U yang juga merupakan seorang raja pada kala itu. Narameikhla pada saat itu diasingkan di Kesultanan Bengal selama 2 tahun. Kesultanan Bengal merupakan sebuah kerajaan Islam yang mencakup wilayah Bangladesh, India bagian Timur serta Barat Myanmar yang didirikan pada tahun 1342 di Bengal. Meskipun Narameikhla diasingkan di kesultanan Bengal, namun kesultanan ini pulalah yang membantunya mendapatkan gelaran Raja di Arakan.

Setelah berdirinya sebuah kerajaan Bengal Arakan akhirnya memperkenalkan diri mereka sebagai sebuah kerajaan Islam dengan Narameikhla atau dikenal dengan nama Suleiman Shah bertindak sebagai raja. Kerajaan Islam yang berkuasa di wilayah Arakan ini bertahan selama lebih kurang

350 tahun sebelum kembali dikuasai oleh Raja Myanmar ada tahun 1784 yang menjadi awal mula berkurangnya populasi masyarakat muslim di kawasan Arakan.

Etnis Rohingya menempati wilayah Rakhine yaitu Negara bagian Myanmar yang terletak di pantai utara Negara tersebut. Negara bagian ini berbatasan langsung dengan Bangladesh dan India. Negara bagian Rakhine merupakan wilayah yang penduduknya memeluk berbagai macam agama, seperti contohnya agama Buddha dan Islam. Mengingat Mvanmar merupakan salah satu Negara masyarakatnya mayoritas menganut agama Buddha, tidak heran apabila di wilayah Rakhine terdapat pula penduduk yang memeluk agama Buddha. Namun tidak hanya agama Buddha, ternyata di wilayah ini terdapat pula penduduk atau etnis yang beragama Islam seperti contoh salah satunya Rohingya.

b. Awal Mula Konflik Rohingya

Konflik di wilayah Rakhine yang melibatkan pihak Rohingya ini pertama kali pecah pada tahun 1784. Pada saat itu masyarakat Rohingya menerima tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang notabene merupakan bagian dari etnis Myanmar. Tindakan diskriminasi ini dilakukan oleh pihak tersebut dikarenakan faktor perbedaan agama, ras dan suku yang terjadi antara etnis Myanmar dan Rohingya. Dimana dari segi agama, etnis Myanmar kebanyakan adalah seorang Buddhis sedangkan masyarakat Rohingya adalah satu etnis yang memeluk agama Islam yang merupakan agama minoritas di Negara tersebut.

Setelah kejadian ditahun tersebut, keadaan antar kedua etnis ini sempat membaik dan jarang sekali terdapat konflik yang besar dan melibatkan kedua etnis tersebut. Hal tersebut juga didukung oleh respon positif yang ditunjukkan oleh pemerintah Inggris selaku Negara yang menjajah Myanmar pada saat itu terhadap masyarakat Rohingya. Hal ini terbukti dengan janji-janji yang diberikan oleh pemerintah Inggris kepada masyarakat Rohingya pada saat itu. Pemerintah Inggris

berjanji akan memberikan otonomi daerah sendiri kepada masyarakat Rohingya, hal tersebut tentu saja mendapat dukungan serta respon positif oleh masyarakat Rohingya.

Tidak sampai disitu, pemerintah Inggris juga sempat mendapatkan sebuah iming-iming kepada etnis Rohingya. Selain sebuah hak otonomi, pemerintah Inggris menjanjikan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Akan tetapi, janji tersebut tidaklah didapat secara gratis, melainkan harus memberikan atau menaruh keberpihakannya kepada pihak Inggris. Waktu berlalu, namun hal tersebut gagal didapatkan oleh etnis Rohingya yang telah memberikan keberpihakannya serta menaruh pengharapan yang tinggi atas dua hal yang dijanjikan sebelumnya. Hal ini dikarenakan pihak Inggris mengalami kekalahan dan harus menyerahkan kedudukannya atas Myanmar kepada Jepang yang merupakan pemenangnya pada tahun 1941.

Keadaan etnis Rohingya pasca kemerdekaan Myanmar dapat dikatakan statis, tidak buruk juga tidak begitu baik. Etnis Rohingya yang merupakan salah satu pihak yang pro terhadap Inggris ini harus lapang dada ketika mayoritas masyarakat Myanmar lainnya lebih memberikan dukungannya kepada pihak Jepang, khususnya masyarakat yang tergolong dalam kelompok etnis Burma. Kelompok etnis Rohingya yang memilih keberpihakannya terhadap Inggris ini akhirnya harus mengakui bahwa Jepang berhasil merebut kekuasaan Inggris atas Myanmar. Perubahan posisi kekuasaan ini menyebabkan etnis Rohingya gagal mendapatkan haknya yang sebagaimana telah dijanjikan oleh pihak Inggris tempo hari.

Dibawah pendudukan bangsa Jepang atas Myanmar, wilayah Arakan ternyata juga ikut bergejolak. Hal ini terbukti pada awal tahun 1942 tepatnya pada bulan Maret, terjadi pembantaian sebanyak 20.000 masyarakat Rohingya yang dilakukan oleh masyarakat Arakan yang beragama Buddha. Selain hal tersebut pada tahun 1948 tepatnya bulan Januari, perselisihan antara pihak Rohingya dengan Pemerintah yang

berkuasa pada saat itu memicu terjadinya gerakan politik serta kelompok bersenjata. Setidaknya, sebanyak 13.000 masyarakat etnis Rohingya mengungsi ke wilayah India dan Pakistan guna mendapatkan perlindungan atas konflik yang kian memanas tersebut. Dengan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat etnis Rohingya tersebut menyebabkan kebencian pemerintah Myanmar beserta masyarakat di dalamnya terhadap etnis tersebut semakin membabi buta yang menghasilkan terjadinya penolakan terhadap etnis Rohingya serta hak warga Negara yang tidak diberikan kepada etnis tersebut.

Kembalinya konflik yang melibatkan kelompok Rohingya ini diawali oleh janji Aung San yang merupakan pemimpin nasional Negara tersebut. Pada saat itu Aung San berjanji kepada seluruh Negara bagian di Myanmar bahwa masing-masing Negara bagian akan mendapatkan hak otonomi atas wilayahnya tersebut. Hal tersebut disampaikan Aung San pada konferensi antar etnis yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Panglong, Myanmar. Atas alasan inilah pihak Arakan atau kelompok Rohingya memberikan dukungan penuhnya untuk Negara pada saat itu. Namun, segera setelah Myanmar mendapatkan kemerdekaannya pihak pemerintah membatalkan perjanjian untuk memberikan hak otonomi pada Negara bagian. Hal ini dikarenakan pemerintah ingin menjadikan Myanmar sebagai Negara yang memiliki satu kesatuan dalam karakternya. Pemerintah Myanmar ingin menjadikan Negara ini menjadi Negara yang memiliki karakter yang satu dengan tidak mengizinkan terdapatnya hak otonomi bagi setiap wilayah atau Negara bagian di dalamnya (Islam, 1997).

Masyarakat Arakan yang sebelumnya telah diberikan janji akan diberikan hak otonomi ini, khususnya kelompok Rohingya yang telah dijanjikan akan mendapatkan hak kewarganegaraannya apabila memberikan keberpihakannya kepada Inggris ini merasa tertipu atas semua janji yang telah diberikan pihak-pihak tersebut. Namun, alasan dibalik perubahan kesepakatan secara sepihak ini ditengarai oleh

adanya ketakutan kelompok Burma terhadap masyarakat etnis lain khususnya yang tinggal di wilayah Arakan.

Rohingya yang merupakan salah satu dari sekian banyak etnis minoritas yang hidup dan berkembang di Myanmar ini berkali-kali mengalami tindakan diskriminasi bahkan hingga dalam tahap yang luar biasa. Salah satu tindakan diskriminasi atas hak-hak asasi atas masyarakat Myanmar ini adalah peristiwa eksodus yang dilancarkan oleh beberapa pihak kepada etnis tersebut. Tidak hanya satu kali, kelompok Rohingya mengalami peristiwa ini sebanyak dua kali. Eksodus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu peristiwa dimana suatu wilayah ditinggalkan oleh sejumlah besar penduduknya. Pada titik ini setidaknya Rohingya mengalaminya dua kali di tahun 1978 dan tahun 1992

Pada tahun 1978 merupakan tahun pertama aksi penyerangan terhadap kelompok Muslim di wilayah Arakah pasca kemerdekaan Myanmar. Jenderal Ne Win yang saat itu menjabat sebagai penguasa di Negara tersebut setelah memenangkan kudeta militerr ini menjadi pemimpin aksi ini. Aksi yang dilakukan oleh Ne Win dan pasukannya ini dikenal sebagai Operation Dragon King atau Operasi Raja Naga atau dalam bahasa Myanmar disebut Naga Min Sitsin Yae. Operasi ini bertujuan untuk menghilangkan kelompok Mujahid atau kelompok yang beragama Islam dari wilayah Arakan. Hal ini dilakukan oleh militer Myanmar dikarenakan adanva kekhawatiran bahwa kelompok ini hendak melakukan tindakan separatisme di wilayah timur Arakan.

Operasi Dragon King ini dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 1978 di Desa Sakkipara, Sittwe. Dalam pelaksanannya, banyak masyarakat Rohingya yang menjadi korban atas tindakan 'operasi' ini. Adapun yang tindakan kekerasan yang dialami kelompok Rohingya pada saat itu seperti penyiksaan, penangkapan masyarakat Rohingya bahkan pembunuhan. Hal ini dilakukan oleh pihak junta

militer karena adanya keyakinan dari mereka bahwa masyarakat Rohingya melakukan afiliasi dengan kelompok Mujahiddin yang menjadi sasaran utama operasi ini. Pihak junta militer khawatir oleh ancaman pihak Mujahiddin yang ingin menggulingkan kekuasaan dari Junta Militer ini (Akbar, 2012)

Akibat penyerangan yang dilakukan oleh pihak Junta Militer ini menyebabkan sebanyak lebih dari 250.000 masyarakat Rohingya melakukan migrasi ke Bangladesh. Peristiwa ini tercatat sebagai peristiwa eksodus terbesar yang terjadi pada kelompok Rohingya. Dihadapkan dengan tekanan yang ditimbulkan oleh kelompok internasional, akhirnya ditahun yang sama pemerintah Bangladesh memutuskan sebuah perjanjian pemulangan, sebuah perjanjian yang berisi bahwa pemerintah Bangladesh akan mengembalikan mayoritas masyarakat Rohingya kembali ke Myanmar (Human Rights Watch, 2000).

Peristiwa eksodus yang melibatkan kelompok Rohingya ini tidak hanya terjadi sekali ditahun 1978 saja. Kejadian serupa dengan waktu silam terjadi kembali tepatnya pada tahun 1992, ketika sebanyak 250.000 masyarakat kelompok Rohingya melakukan perpindahan besar-besaran menuju wilayah Bangladesh. Pemicu dari terjadinya peristiwa ini adalah karena adanya tindak pelecehan seksual berupa pemerkosaan serta berbagai kekerasan yang dialami oleh masyarakat kelompok Rohingya. Alasan demi alasan ini seolah menjadi hal-hal atau alasan yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat Rohingya. Dimana posisi mereka yang merupakan etnis minoritas bahkan tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah setempat, serta berbagai aksi kebencian yang dilakukan masyarakat yang berasal dari etnis mayoritas Negara tersebut pun semakin memperparah keadaan.

Setibanya di Bangladesh, pengungsi Rohingya ini disambut baik serta diberikan berbagai bantuan oleh pihak pemerintah Bangladesh dan juga pihak UNCHR (*United*

Nations Commission of Human Rights). Kedua pihak ini berusaha untuk memberikan bantuan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kelompok Rohingya tersebut. Pemerintah Bangladesh bersama-sama dengan pihak UNCHR serta berbagai badan bantuan sosial non-pemerintah melindungi para pengungsi rohingya yang berada di 19 kamp yang terletak disekitar Bangladesh bagian tenggara tepatnya di Cox's Bazar.

Namun, seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pengungsi Rohingya yang berada di wilayah Negara Bangladesh, hal ini menimbulkan masalah demi masalah baru. Pemerintah Bangladesh memberikan respon atas apa yang terjadi di negaranya dengan mengumumkan bahwa pihaknya tidak akan menyetujui pemberlakuan integrasi lokal dan memutuskan bahwa para pengungsi Rohingya harus kembali ke rumah, atau dengan kata lain pemerintah meminta pengungsi rohingya untuk kembali ke wilayah asalnya. Saat itu Bangladesh sebagai Negara tujuan kelompok tersebut belum menyutujui berbagai kesepakatan, baik itu Konvensi 1951 UN tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967.

Hal serupa pun dilakukan pemerintah Bangladesh pada gelombang pengungsi Rohingya pertama. Pada tahun 1970-an tersebut, pemerintah Bangladesh berupaya untuk mengirim seluruh pengungsi untuk kembali ketempat asalnya dan berusaha untuk mencapai sebuah kata sepakat untuk hal tersebut dengan melakukan negosiasi dengan Dewan Hukum dan Urutan Pemulihan Negara (SLORC) yang bertempat di Meskipun pemerintah Bangladesh Rangoon. melakukan pemulangan terhadap pengungsi Rohingya pada bulan September 1992, namun hal tersebut ternyata tidak berlangsung mudah. Peristiwa pemulangan ini memiliki berbagai masalah, yang mengakibatkan UNCHR turut serta dalam proses tersebut. Akhirnya setelah melalui proses yang pada Oktober hingga panjang, Desember pemerintah Bangladesh berhasil melakukan pemulangan bagi para pengungsi Rohingya yang terdapat di negaranya dengan

bantuan yang diberikan oleh pihak UNCHR (Human Rights Watch, 2000).

Pada beberapa tahun setelah kejadian eksodus 1992 tidak terdapat berbagai peristiwa yang benar-benar menyita perhatian dunia. Berbagai etnis yang hidup di wilayah damai khususnya kelompok Myanmar hidup dengan Rohingya. Tidak terdapat banyak pergerakan yang berarti dari kedua belah pihak, baik itu dari pemerintah serta etnis Burma maupun dari masyarakat etnis Rohingya. Di tahun 1997 Myanmar berhasil mendapatkan pengakuan oleh ASEAN yang secara serta merta mengganti nama negaranya menjadi State Peace and Development Council. Tahun-tahun damai yang berlangsung di Negara inipun tidak bertahan lama, tepat pada 20 tahun setelah peristiwa di tahun 1992 sebuah insiden yang melibatkan kelompok Rohingya terulang kembali.

c. Pecahnya Kembali Konflik Rohingya di Tahun 2012

Tahun 2012 merupakan awal mula bangkitnya kembali konflik antara pihak etnis Burma yang melibatkan pemerintah melawan pihak Rohingya. Namun, beberapa tahun sebelum tahun ini, tepatnya pada tahun 2009 konflik pun secara perlahan mulai terbuka kembali. Pada tahun tersebut, Angkatan Laut Kerajaan Thailand menemukan sebuah perahu yang didalamnya memuat kurang lebih 198 orang Rohingya. Pada kasus ini kelompok Angkatan Laut Kerajaan Thai ini menolak kehadiran dari perahu asing tersebut. Setelah mengalami penolakan oleh pihak Angkatan Laut di Thailand, perahu yang berisikan sejumlah masyarakat Rohingya ini berhasil diselamatkan oleh pihak Angkatan Laut Indonesia yang sedang bertugas di wilayah luar Aceh. Singkat cerita, perahu yang tadinya diselamatkan oleh Angkatan Laut Indonesia ini didorong kembali ke tengah laut untuk sebagaimana yang memulangkan mereka sebelumnya dilakukan oleh pihak Thailand.

Peristiwa ini kembali menyita perhatian dunia serta kembali menyoroti Negara Myanmar terhadap kasus yang kembali membawa kelompok Rohingya di dalamnya. Dari insiden perahu tersebut, pihak Internasional menemukan bahwa terdapat 20 orang yang berasal dari kelompok Rohingya tewas dalam perjalanan menggunakan perahu tersebut yang dikarenakan dehidrasi, serta ditemukan sebanyak 1.200 orang didorong kembali ke lautan. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bukti apabila penolakan ini erat hubungannya dengan upaya penyelundupan imigran gelap yang dilakukan pihak Rohingya.

Tiga tahun berselang dari kejadian di tahun 2009, masyarakat Internasional kembali dikagetkan dengan satu ledakan yang lagi-lagi berhubungan dengan kelompok Rohingya. Pada tahun 2012, sebuah titik utama dari lingkaran persoalan Rohingya dan etnis Burma serta pemerintah Myanmar kembali dimulai. Pada saat itu, sebuah surat kabar lokal yaitu *The New Light of Myanmar* pada edisi 4 juni di tahun yang sama melaporkan telah terjadi sebuah pemerkosaan serta pembunuhan dimana korbannya adalah seorang perempuan yang merupakan anggota dari kelompok Rohingya. Hal ini menurut surat kabar itu merupakan pemicu dari bentrokan yang terjadi antara pihak Rohingya dan lawannya.

Berbagai penyelidikan dilakukan oleh berbagai pihak yang akhirnya membuahkan sebuah fakta apabila perempuan tersebut dibunuh dan diperkosa oleh perampok dikarenakan sang perampok membutuhkan biaya untuk menikah. Tidak berselang lama dari peristiwa tersebut, secara beruntun masyarakat Rohingya menjadi bulan-bulanan masyarakat setempat. Puluhan hingga ratusan warga tercatat menjadi korban babi buta yang dilakukan oleh warga kelompok lain. Hal ini dilakukan mereka bukan hanya terkait masalah perampokan serta pembunuhan diatas melainkan masih terkait dengan status masyarakat Rohingya yang termasuk kedalam golongan minoritas (Ferida, 2016).

Peristiwa perampokan serta pemerkosaan berujung pembunuhan seorang Rakhine ini menimbulkan berbagai respon keras para Muslim di Rakhine. Sebuah surat yang juga mengabarkan berita kematian Thida Htwe ini juga memberikan gambarannya kondisi masyarakat Rohingya saat itu. Pihak surat kabar Myanmar tersebut menggambarkan para korban pembunuhan yang terjadi di Rakhine ini sebagai "Muslim Kalar", meskipun penggunaan kata Kalar dikarenakan tidak adanya kata formal atau non-formal alternatif. Pihak Muslim menganggap penggunaan kata ini merupakan bentuk penghinaan ras terhadap Muslim dan India Burma. Untuk itu, pada tanggal 5 Juni para Muslim penggunaan kata tersebut memprotes serta pembunuhan pihak muslim yang dilakukan semena-mena di wilayah kota Yangon.

Pada saat itu berbagai media resmi serta pihak kantor Presiden Thein Sein melaporkan terdapat lebih dari 1.000 perusuh di wilayah Maungdaw. Wilayah Maungdaw ini merupakan salah satu kota yang terletak didekat perbatasan Bangladesh. Oleh karena peristiwa tersebut terdapat berbagai kerusakan fasilitas publik serta sarana pemerintahan. Setelah diselidiki lebih lanjut kelompok lain menemukan sebuah fakta apabila yang disebut sebagai "perusuh" oleh pemerintah Myanmar ini tidak lain dan tidak bukan ialah kelompok Rohingya. Meskipun pihak media resmi serta pemerintah tidak menyebutnya detailnya secara gamblang, namun media swasta justru menyatakan bila hal tersebut murni ditujukan kepada pihak Rohingya.

Dibalik tuduhan pihak pemerintahan Myanmar terhadap kelompok Rohingya ternyata fakta lain berbicara. Kelompok Rohingya yang sempat dituduh oleh pihak pemerintah setempat sebagai pembuat onar yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana publik ini nyatanya hanya ingin melakukan ibadah disebuah masjid. Menurut masyarakat Rohingya, para pasukan keamanan Burma-lah yang memicu terjadinya kerusuhan. Pasukan

keamanan ini berusaha untuk menghalang-halangi pihak Rohingya untuk melakukan upacara doa di salah satu masjid yang terletak di kota Maungdaw.

Selain peristiwa diatas, pada tahun yang sama berdiri suatu gerakan yang menamakan diri sebagai *Rohingya Elimination Group* yang merupakan gerakan yang dipelopori oleh kelompok ekstrimis 969 atau biasa dikenal dengan nama SKUAD 969. Kelompok ektrimis ini dipimpin oleh salah seorang tokoh agama Buddha di Myanmar bernama Ashin Wirathu. Ashin Wirathu merupakan salah satu biksu radikal yang memiliki rasa dendam terhadap umat muslim khususnya yang berada di Myanmar. Predikat Ashin Wirathu ini telah dikenal oleh banyak orang bahkan diangkat dalam majalah TIME sebagai *The Face of Buddhist Terror*.

Riwayat hidup dari Wirathu juga membenarkan predikat yang telah diberikan majalah tersohor dari Amerika itu untuknya. Ashin Wirathu merupakan salah satu biang kerok terhadap semua hal yang berkaitan dengan kerusuhan yang melibatkan Buddha dan Islam didalamnya. Salah satu kerusuhan yang pernah disebabkan oleh Wirathu ini adalah menyebarkan sebuah iklan propaganda anti muslim yang menyebabkan sebanyak 10 orang yang merupakan umat Muslim terbunuh di tahun 2003. Ia sempat menerima hukuman terhadap kerusuhan yang diperbuatnya namun pada tahun 2010 pemerintah Myanmar memberikan amnesti kepada sejumlah tahanan politik yang berdampak dengan bebasnya Ashin Wirathu.

Kebencian pemimpin SKUAD 969 ini terhadap umat muslim dilatarbelakangi oleh rasa sakit hati terhadap peristiwa yang terjadi di Afganistan pada tahun 2001. Pada tahun tersebut, kelompok Taliban di Afganistan membakar patung Buddha sebagai akhir dari berbagai upaya yang mereka lakukan untuk menghancurkan kelompok Buddha di Barniyan, Afganistan. Dalam agama Buddha patung merupakan salah satu simbol agama yang dianggap suci dan digunakan untuk

menyembah Tuhannya. Hal inilah yang menjadi pemicu kebencian Ashin Wirathu yang berujung membentuk kelompok ekstrimis SKUAD 969 yang memiliki tujuan untuk membasmi agama Islam dimulai dari Myanmar (Putra, 2017).

Pecahnya konflik yang melibatkan kelompok ekstrimis tersebut dengan kelompok rohingya ini memakan 200 korban jiwa dan sebanyak 140.000 warga rohingya dipaksa untuk menempati kamp-kamp pengungsian yang memang kondisinya amat sangat tidak layak untuk ditempati. Konflik yang melibatkan pihak ekstrimis yang beragama Buddha dan kelompok Rohingya yang beragama Islam ini tentu saja menyita perhatian banyak pihak bahkan menyita perhatian global. Pihak United Nations menyebutkan bahwa kelompok Rohingya ini merupakan kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia. Tidak hanya itu, menurut sebuah studi dari salah satu universitas di London mengatakan bahwa etnis Rohingya ini tengah mengalami pemusnahan massal serta penghapusan jejak etnis tersebut dalam sejarah yang merupakan fase akhir dari tindakan genosida (Aksi Cepat Tanggap, n.d.).

Sejak pecahnya kembali konflik yang melibatkan pihak Rohingya dan Burma yang memiliki campur tangan dari pihak pemerintah di tahun 2012 ini, kondisi dari Myanmar maupun kelompok Rohingya ini terus memanas bahkan sampai saat ini. Berbagai laporan kekerasan yang dilakukan pihak Burma kepada kelompok Rohingya terus berdatangan, khususnya pada perempuan yang menjadi korban mayoritas dari konflik tersebut. Sebenarnya, konflik yang melibatkan kelompok Rohingya dengan pihak pemerintah atau etnis Burma ini telah menjadi salah satu konflik menahun yang terjadi di Myanmar. Konflik yang sebelumnya pecah kembali di tahun 2012 ternyata semakin panas dan kembali mengemuka di tahun 2016.

Ditengah-tengah situasi yang masih belum reda sejak kejadian di tahun 2012, secara tiba-tiba muncullah satu

kelompok yang menyatakan bahwa mereka adalah kelompok pembela masyarakat Rohingya. Di tahun 2016 ditengah-tengah situasi masyarakat Rohingya yang masih belum jelas kewarganegaraannya yang menyebabkan terbatasnya sarana dan prasarana bagi masyarakat setempat, muncul satu kelompok yang bernama *Rohingnya Solidarity Organization* (RSO) yang kemudian berganti nama menjadi Arakan Rohingnya Salvation Army (ARSA). Kelompok solidaritas ARSA ini diketuai oleh Atta Ulla atau Abu Umar yang memiliki keluarga berdarah Rohingya, tepatnya sang ibu dan ayah yang berdarah Pakistan Taliban.

Pada akhir tahun 2016 tepatnya pada bulan Oktober, kelompok ARSA ini melakukan penyerangan terhadap aparatur keamanan setempat. Kelompok ini melakukan penyerangan terhadap pos-pos polisi yang mengakibatkan beberapa dari pihak aparatur keamanan meninggal dunia. Kejadian yang melibatkan kelompok ini dengan polisi yang notabene berada di pihak pemerintah dan etnis Burma ini mendapatkan perlawan dari pihak tersebut. Namun. dikarenakan jumlah dari aparatur keamanan tersebut kalah dengan kelompok ARSA, maka mereka semakin leluasa untuk mengepung dan mempersempit ruang gerak dari polisi tersebut. Dengan adanya peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh pihak ARSA terhadap pihak kepolisian tersebut, pemerintah menganggap bahwa situasi di Myanmar khususnya di wilayah Arakan yang menjadi pusat dari kelompok Rohingya ini sudah tidak kondusif lagi.

3. Respon Pemerintah Terhadap Konflik Rohingya

Sebelum pecahnya kondisi diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Rohingya ini terjadi, sikap pemerintah kepada kelompok ini cenderung fluktuatif. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya kestabilan dalam bersikap di dalam tubuh pemerintahan Myanmar, yang dapat dibuktikan dari sikap pemerintah serta etnisnya yang menentang keberadaan pada tahun 1784 yang sempat membaik dimasa-masa menjelang

kemerdekaan namun kembali pecah pada saat pasca kemerdekaan hingga saat ini. Kejadian tahun 1784 lampau memang tidak sepenuhnya merupakan kesalahan pemerintah Myanmar yang mana memang belum adanya sistem pemerintahan bagi Negara yang dahulu dijajah oleh Inggris dan Jepang ini. Namun, mengingat anggota atau orang-orang yang duduk dikursi pemerintahan Myanmar itu kebanyakan berasal dari etnis Burma yang notabene etnis yang terlibat dalam peristiwa tahun tersebut, dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung pemerintah mengamini keadaan yang diskriminatif pada masa tersebut.

Kelompok Arakan merupakan mayoritas di wilayah bagian Arakan ini, namun selain kelompok Arakan, terdapat berbagai kelompok juga yang memiki hak di wilayah ini. Berbagai etnis yang termasuk kedalamnya adalah Kaman, Kamis, Daingnet, Mayagyi, Myo dan Thet. Namun, dari sekian banyak etnis yang termasuk ke dalam daftar etnis yang diakui di wilayah Arakan ini, ternyata tidak mengikutsertakan etnis atau kelompok Rohingya di dalamnya. Kelompok Rohingya pernah mendapatkan pengakuan atas keberadaannya jauh pada masa pemerintahan U Nu yang menjabat pada tahun 1948 sampai tahun 1958. Pada masa itu, Rohingya dianggap sebagai salah satu dari sekian banyak kelompok etnis nasional yang hidup dan menetap di Myanmar.

Namun, sebuah perubahan diciptakan oleh pihak pemerintah Myanmar tepat ketika satu tahun Negara tersebut resmi merdeka. Pihaknya resmi mengeluarkan suatu undangundang yang mengatur persoalan kewarganegaraan di tahun 1949. Di dalam undang-undang nomer 41 tahun 1949 itu diberi judul "Peraturan Pendataan Warganegara Burma", didalamnya berisikan peraturan yang merupakan warisan Inggris yang merupakan penjajah pendahulunya dengan berbagai perubahan ala kadarnya dikarenakan terbatasnya waktu (Bahamin, 2016). Pada bulan juni ditahun 1950 pemerintah membentuk sebuah komite yang beranggota sembilan orang yang bertugas untuk menyusun rancangan

yang membahas tentang berbagai aturan dan tata cara pecatatan kewarganegaraan yang diketuai oleh U Ka Si yang menjabat sebagai Deputi Kementerian Dalam Negeri kala itu.

U Ka Si bersama koleganya berhasil menyelesaikan draft pada tahun yang sama yakni tahun 1950. Selanjutnya, pada Januari tahun 1951 rancangan yang telah disusun oleh komite tersebut diusulkan kepada pihak parlemen untuk mendapatkan pengesahan. Setelah melalui tiga kali rangkaian sidang, pada bulan februari draft tersebut dinyatakan sebagai undang-undang oleh pemerintah Myanmar. Undang-undang tersebut mendapatkan nomer urut 117 dengan isi didalamnya terdapat peraturan siapa saja diakui sebagai warga Negara Myanmar. Menurut undang-undang tersebut, pihak-pihak yang diakui sebagai warga Negara Myanmar adalah masyarakat yang berasal dari suku-suku asli yang mendiami daerah dataran tinggi, masyarakat kelompok Bamar dan etnis mayoritas lain. Selain itu, yang tergolong sebagai warga Negara ini adalah orang yang berdarah campuran serta kelompok ekspatriat yang memilih menetap di Burma dan mengganti status kependudukannya.

Undang-undang yang sebelumya telah disetujui oleh pemerintah Myanmar ini mulai diedarkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri Myanmar pada bulan februari ditahun yang sama. Menurut peraturan ini, setiap warga Negara yang telah mencapai usia 12 tahun atau lebih dapat mendaftarkan dirinya agar mendapatkan tanda pengenal dan status sebagai warga Negara Myanmar. Untuk melancarkan usaha pendataan warga Negara yang dilakukan pihak Myanmar ini, dibentuklah Komisi Pendaftaran yang ketuanya ditunjuk langsung oleh presiden Myanmar yang pertama, Sao Shwe Thaik.

Petugas pendaftaran ini tersebar disetiap sudut Negara Myanmar, tidak terkecuali daerah pedesaannya. Di daerah tersebut terdapat seorang petugas pendaftaran yang dibantu oleh satu orang asisten yang bertugas untuk melakukan pendataan terhadap warga pedesaan setempat. Hal ini telah melalui berbagai seleksi kualifikasi serta pelatihan yang dilakukan oleh Negara, para petugas ini juga merupakan seorang relawan dan dikontrak oleh Negara selama 3 bulan. Pelatihan yang dijalani oleh para petugas ini ialah mengenai tata cara pendataan serta teknis pengisian formulir kewarganegaraan. Mekanisme kerja dari para petugas ini adalah melakukan pendataan warga yang turut dibantu oleh kepala desa setempat agar nantinya hasil dapat diserahkan kepada petugas di tingkat distrik.

Proses pendaftaran warga Negara serta penerbitan kartu identitas kewarganegaraan ini resmi dimulai pada 1 Maret tahun 1952 di ibukota Myanmar pada saat itu, Yangon. Tata cara yang dilakukan oleh pemerintah Burma adalah dengan mendatangi rumah-rumah warga dan melakukan proses rekam data. Para penduduk yang sebelumnya telah mendapatkan kartu tanda penduduk, tidak akan diberikan tanda pengenal baru karena telah dianggap sah terdaftar sebagai warga Negara Myanmar berdasarkan undang-undang 41/1949. Adapun salah satu tujuan dari dilakukannnya pendataan ini adalah untuk mengkategorikan penduduk Myanmar menjadi dua bagian, yakni penduduk Burma dan warga asing yang terdaftar secara sah.

Kartu Identitas atau tanda pengenal yang mirip dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Indonesia yang diterbitkan pada masa rekam data ini merupakan dokumen resmi yang memungkinkan seseorang untuk tidak mendapatkan halangan atau pembatasan ketika sedang melakukan kegiatan di dalam maupun diluar Myanmar. Diawal periode kartu tersebut kerap kali digunakan oleh warga muslim di Myanmar ketika merika mengurus paspor maupun ketika mereka hendak mengadakan perjalanan umroh dan haji ataupun melakukan studi ke luar negeri. Sedangkan, kegunaan kartu ini di dalam negeri adalah sebagai suatu prasyarat ketika seseorang akan mendaftar sebagai pegawai pemerintah dan dilampirkan saat melakukan pembayaran pajak.

Melalui kartu identitas inilah yang menjadikan bukti sejarah periode pengakuan pemerintah terhadap keberadaan kelompok Rohingva di dalam administrasi kependudukan Myanmar. Akan tetapi, pada tahun 1970 kartu identitas tersebut berhenti beredar bagi masyarakat Rohang atau yang sekarang disebut dengan masyarakat Rohingya. Kebijakan pemberhentian terbitnya kartu tersebut dilakukan oleh Jenderal Ne Win yang berhasil merebut kepemimpinan di Myanmar pada 2 Maret 1962. Pada tahun 1966 tepatnya pada empat tahun kemudian, dilakukan sebuah operasi kependudukan "Sabe" yang dalam pelaksanaannya melakukan penyitaan terhadap ribuan kartu identitas yang dimiliki kelompok Rohingya. Penyitaan tersebut dilakukan karena menurut mereka keberadaan kelompok Rohingya tersebut dapat mengganggu stabilitas dan keutuhan nasional. Hingga saat ini, pihak tersebut tidak pernah mengembalikan kartu identitas milik kelompok Rohingya tersebut.

Keadaan berlangsung selama jenderal Ne Win menjabat atau menduduki kursi pemerintahan di Myanmar pada tahun 1962 sampai 1988. Ne Win merupakan salah satu pemerintah Myanmar yang mendapatkan kekuasaannya melalui okupasi militer. Akan tetapi, Ne Win merupakan sosok pemerintah Myanmar yang anti terhadap kelompok Rohingya. Beliau menolak untuk mengakui keberadaan dari kelompok Rohingya ini. Baginya, kelompok Rohingya ini adalah sekelompok imigran tidak sah yang datang ke Myanmar khususnya Arakan dan telah ada di wilayah tersebut sejak jaman penjajahan Inggris.

Jenderal Ne Win yang berhasil melakukan kudeta atas Myanmar pada tahun tersebut langsung membuat berbagai kebijakan, salah satunya adalah mengusir ratusan ribu kaum Muslim keturunan India yang menurutnya merupakan bagian dari proses nasionalisasi. Jenderal Ne Win merupakan orang pertama yang mencetuskan proses delegitimasi kepada kelompok Rohingya. Ne Win merupakan sosok dibalik Constitution of the Socialist Republic of Myanmar dan

Emergency Immigration Act di tahun 1974, dimana kedua kebijakan ini merupakan acuan utama dalam pembentukan sistem kewarganegaraan yang berbasis etnisitas.

Melalui kebijakan *Emergency Immigration Act* tahun 1974 ini, Ne Win mencoba membatasi ruang gerak masyarakat Rohingya. Kebijakan ini menjadi pembuka gerbang terbitnya kebijakan pemerintah Myanmar lainnya yang semakin mempersempit ruang gerak kelompok Rohingya. Puncak dari pergerakan pemerintah Myanmar ini adalah ketika undang-undang diciptakannya yang mengatur hak kewarganegaraan pada tahun 1982. Pada tahun ini Ne Win memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan Burma (Burmese Citizenship Law) yang didalamnya terdapat empat tipe kewarganegaraan Burma. Tipe pertama dari undangundang ini adalah warga utama (citizen), tipe kedua yaitu warga Negara sekunder atau yang termasuk kedalam "kelas dua" (associate citizen), warga naturalisasi (naturalized citizen) dan tipe terakhir adalah orang asing (foreigner) (DW.Com, 2017).

Melalui kebijakannya ini pemerintah Myanmar berhasil mengejutkan masyarakat Internasional pada saat itu. Salah satu isi yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah untuk menolak memberikan kewarganegaraan kepada masyarakat etnis Rohingya. Dalam berbagai tipe yang terdapat di undang-undang tersebut, kelompok Rohingya termasuk kedalam tipe orang asing atau *foreigner* bukan kedalam tipe warga Negara atau *citizen*. Kejadian tersebut merupakan salah satu tindakan diskriminatif terhadap hak asasi seorang individu dalam mendapatkan kewarganegaraannya.

Selain itu, kejadian ini juga sekaligus membuka kembali memori masyarakat Internasional atas apa yang sebelumnya telah dilakukan oleh Myanmar terhadap orang keturunan Tiongkok dan India yang dianggap mereka sebagai orang non-pribumi. Undang-undang yang mengandung pelarangan pemberian kewarganegaraan Myanmar kepada masyarakat etnis Rohingya ini merupakan sebuah 'karya' yang diciptakan atau yang berasal dari konsep pemikiran Dr. Maung Maung jauh sebelum undang-undang tersebut diresmikan yakni tahun 1978. Dengan adanya undang-undang tersebut, terlihat jelas pemerintah ingin mempertahankan posisi dimana etnis Burma masih menjadi etnis yang paling berpengaruh dalam sistem perpolitikan, sosial serta pemerintahan Negara tersebut.

Dalam undang-undang di tahun 1982 yang mengatur tentang sistem kewarganegaraan Myanmar dan hak-hak kewarganegaraan ini, kelompok Rohingva termasuk ke dalam golongan foreigner atau pendatang asing. Tujuan dari Burma's Citizenship Act atau Undang-Undang Kewarganegaraan Burma ini adalah adalah untuk memberikan kewargangaraan kepada orang-orang yang tinggal di Burma/Myanmar agar dapat melacak keberadaan serta tempat tinggal keluarga mereka sebelum tahun 1823, atau pada saat kampanye militer Inggris pertama di Myanmar serta terjadi gelombang imigrasi dari India dan China. Namun, faktanya undang-undang tersebut memiliki banyak permasalahan. Hal tersebut dikarenakan terbatas bahkan tidak adanya dokumentasi terkait keluarga dari berbagai kelompok etnis tersebut yang membuktikan apakah mereka memiliki akar yang kuat di Myanmar (Harvard Divinity School, -)

Jika menilik dari pernyataan yang disebutkan diatas, maka kelompok atau etnis Rohingya sudah jelas termasuk kedalam bagian warga Negara Myanmar. Hal ini dikarenakan kelompok Rohingya ini telah menetap dan berada di Myanmar sejak abad ke-16 atau lebih tepatnya ketika Myanmar masih berada dibawah kuasa Inggris kala itu. Tentu saja selama waktu tersebut hingga diciptakannya undang-undang tersebut kelompok Rohingya ini telah melakukan asimilasi dengan budaya setempat. Melihat hal tersebut, semestinya etnis rohingya ini dapat digolongkan sebagai masyarakat asli Myanmar dan etnis tersebut dapat dicantumkan sebagai salah

satu etnis yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam di Myanmar.

Melihat dari berbagai penjelasan diatas, Rohingya ternyata termasuk kedalam salah satu etnis yang diakui semasa penjajahan Inggris. Selain itu, menilik dari sejarahnya, ternyata etnis Rohingya adalah salah satu etnis pembawa agama Islam untuk masuk ke Negara Myanmar. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan adanya kekuatan etnis mayoritas membuat etnis atau kelompok ini kehilangan kekuatannya. Berbagai permasalahan dengan kelompok etnis mayoitas di Myanmar yaitu Burma semakin memperburuk keadaan kawasan serta masyarakat Rohingya sendiri. Kasus yang terjadi di tahun 1700-an akhirnya kembali pecah dan meluas pada tahun 2016. Dengan adanya konflik ini juga membuka kembali sejarah kelam masyarakat Rohingya terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan etnis Burma terhadap mereka. Selain hal tersebut, timbulnya konflik ini membuat ratusan bahkan ribuan korban yang mayoritas perempuan kembali berjatuhan. Namun, dibalik situasi yang tidak menguntungkan bagi perempuan sebagaimana yang telah dijelaskan penulis diatas, perempuan juga mampu menjadi pelopor terjadinya resolusi konflik khususnya di Myanmar. Penjelasan untuk hal tersebut akan penulis bahas di bagian selanjutnya dalam skripsi ini.